



Analisis Kebijakan Wajib Swab PCR terhadap Kehadiran Peserta SKD CPNS Aceh Barat

Agus Pratama, Al Zuhri, Siti Jahria Sitompul, Nurasma Aripin, Nurhaslita Sari

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: October 08, 2021
Revised: February 19, 2022
Available online: June 15, 2022

KEYWORDS

Policy Analysis, Swab PCR, SKD CPNS

CORRESPONDENCE

Name: Al Zuhri
E-mail: alzuhri@utu.ac.id

A B S T R A C T

The Indonesian government in 2021 will reopen the recruitment of Civil Servant Candidates (CPNS) for the wider community. The implementation of the 2021 CPNS recruitment was carried out in the midst of the Covid-19 pandemic, so the government added requirements to take part in the Basic Competency Selection (SKD). The stipulation is that every SKD participant who will enter the exam room must show a PCR/Antigen Swab result with a negative Covid-19 result. This provision is a policy that must be obeyed by all CPNS participants who take part in the SKD. This policy received quite a variety of responses from SKD participants. Based on these facts, the purpose of this study is to find out the causes and relationship of the mandatory PCR/Antigen swab policy with the absence rate of 2021 CPNS participants from the 2021 CPNS SKD in West Aceh. The method used is descriptive analysis with a qualitative approach, with data collection techniques through in-depth interviews with participant informants who are absent from the SKD CPNS 2021. So that it can be used as a reference by the government in setting a policy in the future.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia pada tahun 2021 kembali membuka rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) bagi masyarakat umum. Hal ini merupakan kabar baik bagi masyarakat untuk mengabdikan diri sebagai abdi negara, mengingat profesi "Civil Servant" merupakan salah satu profesi idaman yang didambakan oleh sebagian masyarakat Indonesia (Wulandari, 2014). Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) (Indonesia, 2014).

Berdasarkan data tahun 2017 tercatat 2.433.656 pelamar CPNS memperebutkan 37.138 formasi yang tersedia. Sementara data tahun 2018 berjumlah 4.436.696 orang mendaftarkan diri sebagai calon abdi negara, kuota yang diterima berjumlah 238.015 formasi. Kemudian tahun 2019 jumlah pelamar yang mendaftarkan diri semakin meningkat, pelamar yang telah membuat akun pendaftaran berjumlah 5.057.596 akun pelamar (Erlangga, 2019). Sedangkan penerimaan CPNS tahun 2021 berjumlah 676.733 formasi yang dibuka oleh pemerintah dengan rincian 128.016 formasi CPNS dan 548.717 formasi PPPK (Muhammad Choirul, 2021).

Aceh Barat merupakan salah satu kabupaten yang membuka penerimaan CPNS dan PPPK. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara jumlah kebutuhan ASN di lingkungan Aceh Barat tahun anggaran 2021 berjumlah 806 formasi dengan rincian 306 formasi CPNS dan 500 formasi PPPK (Maheza, 2021). Pelaksanaan rekrutmen CASN tahun ini dilaksanakan di tengah-tengah kondisi pandemi Covid-19, situasi ini tentu berpotensi melahirkan berbagai permasalahan baik bagi peserta maupun pihak panitia penyelenggara atau organisasi (Daniarsyah & Rusdi, 2021). Ada beberapa perbedaan ketentuan dalam tahapan rekrutmen di masa pandemi saat ini dibandingkan dengan pelaksanaan sebelum Covid-19 muncul di

Indonesia. Salah satu hal teknis yang membedakan adalah adanya kewajiban peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS untuk melakukan tes swab Polymerase Chain Reaksi (PCR) atau antigen. Kewajiban tersebut merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan tindak lanjut surat rekomendasi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid Nomor: B-115/KA SATGAS/PD.01.02/8/2021 terkait permohonan izin pelaksanaan seleksi CASN 2021 (Mela Arnani, 2021).

Berdasarkan kebijakan di atas, pemerintah daerah memiliki cara berbeda dalam menyikapi kebijakan tersebut. Ada pemerintah daerah yang menggratiskan biaya tes swab PCR atau antigen bagi peserta SKD CPNS dan ada juga pemerintah daerah yang mengharuskan peserta untuk membayarnya. Terkait gratis dan berbayarnya tes swab PCR, ini merupakan kebijakan dari pemerintah setempat yang legal untuk dilakukan. Walaupun, hipotesis sementara ada sebagian masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan yang bersifat berbayar. Pilihan tindakan pemerintah tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Thomas Dye dalam (Anggara, 2014) bahwa kebijakan publik merupakan apapun yang menjadi pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan. Namun konsep yang ditawarkan oleh Dye cakupan maknanya sangat luas, tentu pemerintah yang baik adalah pemerintah yang melakukan action di tengah permasalahan publik. Makna kebijakan di atas mengandung arti:

1. Pembuat kebijakan publik adalah pemerintah bukan organisasi swasta;
2. Kebijakan publik merupakan sebuah pilihan yang akan dipilih oleh pemerintah, "to do or not to do";
3. Kemudian, seperti apa dampak yang akan muncul dari kebijakan tersebut apabila dilakukan atau tidak dilakukan (AG, 2015)

Jika mengacu pada pengertian tersebut acap kali berkaitan erat dengan makna tindakan politik. Dunn dalam (Tahir, 2011) mengatakan bahwa analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses yang bersifat politik. Ada dua hal yang harus dipisahkan dalam makna pengertian dunn yaitu:

1. Aktifitas intelektual yang sering disebut sebagai *Policy Analysis*, dan
2. Aktifitas politik yang sering diistilahkan dengan *Policy Maker*.

Patton dan Sawicky dalam (Yulianto, 2015) mengatakan pembagian jenis analisis kebijakan dibagi menjadi dua, antara lain yaitu:

1. Analisis deskriptif, muatan dari pelaksanaan analisis deskriptif adalah memberikan deskriptif atau gambaran terkait permasalahan yang ada, tidak sampai pada pemberian *feedback* atau solusi dari permasalahan yang ada.
2. Analisis reskriptif, bahasan dari analisis ini adalah adanya *wayout* atau solusi yang ditawarkan dari permasalahan, sehingga ada rekomendasi-rekomendasi untuk menyelesaikan masalah.

Kebijakan tes swab PCR atau antigen dalam pelaksanaan SKD CPNS di Kabupaten Aceh Barat tidak ditanggung oleh pemerintah atau berbayar, adapun biaya untuk tes swab PCR di Aceh Barat berkisar dari Rp80.000-Rp100.000 untuk sekali tes. Jumlah peserta yang akan berpartisipasi dalam pelaksanaan SKD CPNS tahun 2021 sebanyak 6.951 peserta formasi CPNS dan 185 peserta PPPK non guru, data ini diperoleh berdasarkan Surat Nomor: PEG.810/542/2021 tentang Hasil Verifikasi Ulang Masa Sanggah Seleksi Administrasi Pelamar CASN Kabupaten Aceh Barat. Salah satu ketentuan dalam pelaksanaan SKD CPNS Aceh Barat peserta diwajibkan hadir 90 (sembilan puluh) menit sebelum pelaksanaan ujian untuk validasi data. Kehadiran peserta merupakan bagian dari partisipasi dalam pelaksanaan SKD CPNS.

Merujuk pada pendapat (Ali, n.d.) kehadiran berasal dari kata hadir yang bermakna ada, datang. Sementara, menurut (KBBI Daring, 2016) kehadiran adalah perihal hadir, adanya seseorang, sekumpulan orang pada suatu tempat. Sementara masih dalam kamus yang sama makna ketidakhadiran bermakna perihal tidak hadir, tidak datang pada suatu tempat. Selanjutnya, menurut Panggabean dalam (Tohir, 2010) ketidakhadiran didefinisikan sebagai kegagalan seseorang untuk hadir pada tempat kerja di hari kerja, sehingga makna yang tersirat bila dikaitkan dengan ketidakhadiran peserta SKD CPNS yaitu tidak datang ke lokasi ujian dan tidak mengikuti ujian pada hari pelaksanaan ujian.

Dalam pelaksanaan SKD CPNS seseorang dapat dikatakan hadir apabila sudah ada di lokasi ujian dan memverifikasi data sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh panitia pelaksanaan CPNS Aceh Barat. Kehadiran berkaitan erat dengan partisipasi dalam pelaksanaan SKD CPNS. Menurut Made Pidarta dalam (Dwiningrum, 2011) mengatakan partisipasi adalah keterlibatan peran serta seorang baik dilakukan oleh seorang individu maupun kelompok dalam suatu kegiatan tertentu.

Menurut Cohen dan Uphof dalam (Kalesaran, 2015) jenis partisipasi dapat dibedakan dalam beberapa bentuk anatara lain:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan;
2. Partisipasi dalam pelaksanaan;
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat; dan

4. Partisipasi dalam evaluasi.

Partisipasi dalam pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai keterlibatan seseorang dalam menentukan keputusan, partisipasi yang dibutuhkan dalam poin ini adalah bagaimana masyarakat mampu memberikan alternatif sumbangan pemikiran dalam mengatasi permasalahan yang ada. Sementara partisipasi dalam pelaksanaan berkaitan dengan peran seseorang untuk mengikuti atau tidak mengikuti kebijakan tersebut. Partisipasi dalam pengambilan manfaat bermakna bagaimana seseorang dapat mengambil manfaat atas implementasi kebijakan yang telah dibuat, kebijakan yang bermanfaat sering diistilahkan dengan *responsiveness* atau daya tanggap terhadap permasalahan yang melahirkan solusi yang tepat, sehingga publik dapat merasakan manfaat atas kebijakan yang dipilih.

Partisipasi dalam evaluasi berhubungan dengan penilaian atas pelaksanaan kebijakan yang telah dipilih. Selanjutnya menurut Wollman dalam (Lintjewas et al., 2016) apabila dikaitkan dengan evaluasi kebijakan maka proses evaluasi dapat dilaksanakan secara:

- a. *Ex-ante* yang bermakna menganalisis sebuah kebijakan sebelum kebijakan tersebut diadopsi atau dalam istilah analisis kebijakan disebut sebagai proses peramalan (*forecasting*);
- b. *On Going* berkaitan dengan penilaian kebijakan ketika sedang dilaksanakan; dan
- c. *Ex-Post* dapat didefinisikan sebagai penilaian kebijakan setelah kebijakan tersebut selesai dilaksanakan.

Berdasarkan surat Nomor: PEG. 810/809/2021 tentang hasil SKD CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2021 terdapat 876 peserta tidak hadir selama pelaksanaan SKD. Hal ini membuat penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut tentang penyebab dan korelasi kebijakan wajib swab PCR dengan ketidakhadiran peserta pelaksanaan ujian SKD CPNS di lingkungan pemerintahan Aceh Barat Tahun 2021.

METODE

Penelitian yang diusung menggunakan metode desain deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode yang alamiah (Moleong, 2011). Mengacu pada pandangan Bogdan dan Taylor dalam (Basrowi, 2008) penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai penelitian yang hasil akhirnya menghasilkan data dalam bentuk gambaran, uraian seperti kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Adapun alasan penulis menggunakan metode kualitatif yaitu untuk mengetahui informasi secara detail tentang ketidakhadiran peserta dapat digali melalui wawancara secara mendalam. Alasan selanjutnya, karena minimnya jumlah responden hal ini disebabkan oleh keterbatasan penulis dalam mendapatkan informasi data atau identitas peserta yang tidak hadir, informasi yang tertera memuat nama, nomor ujian, nilai dan keterangan peserta sehingga penulis kesulitan mendapatkan responden walaupun secara tertulis terdapat 876 peserta tidak hadir. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka penulis menilai pendekatan kualitatif lebih mendukung dalam penelitian ini.

Informan dalam penelitian ini adalah peserta yang tidak hadir dalam pelaksanaan SKD CPNS, sehingga alasan ketidakhadiran peserta akan dideskripsikan dan dikaitkan dengan kebijakan wajib swab PCR apakah memiliki korelasi atau tidak.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah snowball sampling. Menurut Sutopo dalam (Andrasromo & Nurekawati, 2016) snowball sampling merupakan cara dalam pemilihan informasi pada saat penelitan, dimana penulis menemukan informasi baru berdasarkan petunjuk informan awal yang selanjutnya berdasarkan petunjuk inforaman tersebut penulis mendapatkan informasi lanjutan dan seterusnya berganti informan lainnya sehingga mendapatkan data yang lengkap dan mendalam. Sementara menurut Salganik dalam (Lenaini, 2021) snowball sampling merupakan metode yang sifatnya didapat secara bergulir dari responden satu ke responden yang lainnya. Menurut Suhardjo dalam (Nurdiani, 2014) untuk menentukan skala awal jumlah responden maka dapat ditentukan dengan jumlah responden 2-12 orang, jumlah tersebut termasuk kedalam skala medium jumlah responden. Setelah penelusuran lebih lanjut, penulis mendapatkan 11 orang responden dari berbagai formasi instansi pilihan peserta untuk dilibatkan dalam penelitian. Berikut pada tabel 1. identifikasi peserta:

Tabel 1. Tabel Lokasi Formasi Pilihan Responden

No	Lokasi Formasi	Responden yang Teridentifikasi
1.	Dinas PUPR	2 Orang
2.	Bappeda	3 Orang
3.	BPP Arongan Lambalek	2 Orang
4.	Asisten Pemerintahan	1 Orang
5.	BPP Pante Ceureumen	2 Orang
6.	Puskesmas Johan Pahlawan	1 Orang

Mendalami konsep yang ditawarkan (Bungin, 2011) maka penelitian ini akan berakhir jika penulis berada pada tingkat kejenuhan terhadap informasi yang diperoleh atau penulis tidak mendapatkan lagi sampel untuk diteliti. Dalam penelitian ini, sebagian responden meminta untuk dijaga kerahasiaan identitasnya mengingat jawaban yang disampaikan dikhawatirkan berdampak pada responden. Sesuai dengan pendapat (Rahardjo, 2013) apabila informan meminta untuk dirahasiakan identitasnya, maka penulis dapat menghendaknya dengan menulis inisial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti, maka secara garis besar terdapat beberapa faktor penyebab tidak hadirnya peserta SKD CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021, antara lain:

Faktor Kesempatan dan Peluang

Faktor kesempatan dan peluang, dalam hal ini berkaitan tentang waktu, keluasaan, dan peluang (KBBI Daring, 2016), sehingga dominan alasan dari responden tidak hadir dalam pelaksanaan SKD CPNS meliputi faktor kesempatan dan peluang. Berikut merupakan kutipan hasil wawancara dengan informan:

“Saya tidak hadir dalam pelaksanaan ujian SKD karena posisi saya sekarang berada di luar kota dan bagi saya pribadi kebijakan swab PCR tidak berpengaruh bagi saya, toh sekarang juga lagi masa pandemi. Terkait gratis ataupun berbayar saya tetap ikut, tetapi permasalahan saya adalah

posisi saya sedang di luar daerah. Saya baru lulus kerja ditempatkan di luar daerah”. (R)

“Alasan saya tidak mengikuti SKD CPNS, karena terpaut jarak tempat tinggal sangat jauh dengan lokasi ujian, jadi kebetulan saat itu saya berada di pulau Simeulue. Jadwal keberangkatan kapal saya adalah H-1 dari jadwal ujian, tetapi karena cuaca buruk kedatangan kapal menjadi terlambat. Seharusnya saya tiba di Meulaboh jam 09.00 WIB, tetapi jam 11:30 kapal baru tiba sementara jadwal ujian saya jam 11:00 dan harus sudah berada di lokasi ujian karena tidak mungkin untuk terkejar maka saya putuskan untuk tidak mengikuti ujian SKD CPNS. Terkait permasalahan kebijakan swab saya tidak ada masalah karena semenjak keberangkatan dari Simeulue saya juga telah dites swab”. (N)

“Alasan tidak hadir pada saat itu, istri saya sedang sakit karena kondisinya lagi hamil jadi saya berhalangan untuk hadir pada saat itu. Untuk masalah Swab bagi saya tidak ada masalah, bahkan saya vaksin sudah lengkap juga, tetapi masalah utama memang fokus dengan keadaan istri, mudah-mudahan tahun depan ada kesempatan”. (M)

“Reason kenapa saya tidak hadir, karena saya masih ragu beneran mau ikut CPNS atau tetap dengan kerjaan sekarang ini. Intinya banyak pertimbangan lainnya, tetapi hati masih lebih berat dengan kerjaan yang sekarang, sehingga saya putuskan untuk tidak ikut CPNS. Bagi saya tidak masalah dengan test swab”. (T)

“Salah satu alasan saya tidak ikut serta karena pada saat itu saya sedang disibukkan dengan pekerjaan, sehingga saya bimbang dan akhirnya memilih untuk tidak ikut ujian”. (D)

“Sebenarnya saya sudah hadir, akan tetapi pada saat itu saya telat karena disaat yang bersamaan saya ada jadwal sidang, sehingga terlambat. Berkenaan dengan masalah swab tidak masalah karena saya memang mengikutinya”. (A)

“Alasan saya tidak datang dikarenakan lokasi ujian dengan tempat tinggal saya sangat jauh. Kemudian melihat dari segi peluang pun sangat kecil kemungkinan untuk lewat/lulus, sementara yang ikut ratusan orang diformasi saya”. (P)

Faktor Kebijakan Swab

Faktor kebijakan swab berpengaruh terhadap ketidakhadiran peserta dalam pelaksanaan SKD CPNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat, berikut hasil kutipan wawancara dengan informan:

“Alasan utama saya tidak hadir dalam kegiatan ujian SKD CPNS karena adanya kebijakan swab. Jadi saya berubah pikiran, apalagi jika hasil test swab positif nanti sudah panjang urusannya. Untuk tahun depan apabila tidak ada aturan swab, maka saya akan ikut”. (P)

“Penyebab saya tidak datang dalam rangkaian ujian SKD CPNS karena ada persyaratan wajib swab, ditambah lagi dengan swab berbayar. Jujur saya takut apabila diswab hasilnya positif karena akan bermasalah dengan aktifitas lain. Kemudian dari segi peluang, kemungkinan untuk lulus sangat kecil sehingga kesimpulan saya adalah tidak ikut. insyaallah apabila tahun depan tidak ada kebijakan wajib swab, saya akan ikut”. (M)

“Ketidakhadiran saya pada ujian tersebut dikarenakan swab. Kenapa saya daftar CPNS karena dulu belum ada pengumuman tersebut. Di tengah jalan baru terbit pengumuman tentang harus swab terlebih dahulu, maka saya memutuskan untuk tidak hadir dalam rangkaian ujian tersebut”. (P)

“Alsan saya tidak ikut ujian karena diwajibkan swab, sementara saya takut apalagi saya baru ada anak bayi, kalau positif nanti disuruh isolasi kasian anak saya”. (J)

Faktor Ekonomi (Finansial)

Salah satu penyebab ketidakhadiran peserta SKD CPNS di lingkungan pemerintahan Aceh Barat disebabkan oleh faktor ekonomi, berikut merupakan hasil wawancara penulis:

“Alasan selanjutnya saya tidak mengikuti ujian SKD CPNS berkaitan dengan keuangan atau finansial saya saat ini, karena memang sedang membutuhkan uang. Jadi berhubung swab berbiaya jadi untuk tahun ini saya tidak berpartisipasi”. (M)

Berikut merupakan penyajian data tentang alasan ketidakhadiran peserta ujian SKD CPNS dilingkungan pemerintah Aceh Barat Tahun 2021 dalam bentuk diagram.

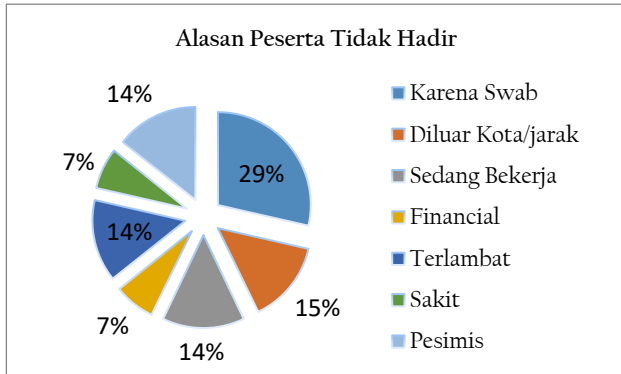


Diagram 1. Alasan Ketidakhadiran Peserta

Merujuk pada hasil interview dan penyajian data melalui diagram di atas, maka dapat disimpulkan alasan utama peserta tidak hadir dalam pelaksanaan SKD CPNS dilingkungan pemerintahan Aceh Barat Tahun 2021 disebabkan oleh faktor peluang dan kesempatan. Faktor peluang dan kesempatan meliputi posisi peserta yang sedang berada di luar kota dengan persentase 15%, peserta ujian yang terlambat hadir 14%, jadwal ujian yang bersamaan dengan waktu kerja peserta 14%, peserta yang berhalangan hadir karena sakit 7%, dan peserta yang menganggap peluang untuk lulus sangat kecil 14%. Sehingga, total akhir persentase peserta tidak hadir karena faktor kesempatan dan peluang berjumlah 64%. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi peserta tidak hadir dalam pelaksanaan SKD CPNS yaitu pengaruh kebijakan wajib swab, persentase pengaruh kebijakan berjumlah 29%, peserta menganggap wajib swab akan menambah permasalahan baru apabila peserta dinyatakan positif covid-19. Faktor terakhir yang peneliti temui yaitu faktor ekonomi, peserta merasa sulit dengan biaya untuk tes swab karena kemampuan ekonomi peserta saat ini belum stabil, adapun persentase faktor finansial berjumlah 7%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan fokus permasalahan di atas maka dapat disimpulkan faktor penyebab ketidakhadiran peserta dalam pelaksanaan SKD CPNS dilingkungan pemerintah Aceh Barat Tahun 2021, antara lain:

1. Faktor kesempatan dan peluang, faktor ini terdiri atas:
 - a. Peserta yang sedang berada di luar kota,
 - b. Jadwal ujian bersamaan dengan waktu kerja peserta,
 - c. Keterlambatan kehadiran peserta,
 - d. Peserta berhalangan hadir karena sakit,
 - e. Kuota dan peluang untuk lulus ASN sangat kecil.
 sehingga apabila dikalkulasi dari semua item kesempatan dan peluang berjumlah 64%, sehingga ini menjadi faktor utama ketidakhadiran peserta dalam pelaksanaan SKD CPNS.
2. Faktor kebijakan swab PCR, alasan selanjutnya ketidakhadiran peserta disebabkan karena ada kebijakan

tes swab PCR. Persentase untuk faktor kebijakan swab PCR berjumlah 29%.

3. Faktor ekonomi (finansial), penyebab selanjutnya ketidakhadiran peserta dalam mengikuti SKD disebabkan karena tes swab berbiaya, keadaan ekonomi sebagian peserta pada belum stabil. Adapun persentase untuk faktor finansial berjumlah 7%.

Secara keseluruhan terdapat hubungan atau keterkaitan antara kebijakan wajib swab pcr dengan ketidakhadiran peserta SKD CPNS Aceh Barat Tahun 2021. Meskipun, persentasenya masih rendah yaitu 29% responden berpendapat alasan ketidakhadiran disebabkan oleh faktor kebijakan wajib swab PCR. Sementara faktor utama penyebab ketidakhadiran peserta SKD CPNS disebabkan oleh faktor kesempatan dan peluang.

Terkait permasalahan tersebut, penulis memberikan solusi atau rekomendasi kepada pemerintah. Adapun wayout yang ditawarkan kepada pemerintah yaitu jika pelaksanaan rekrutmen CASN ke depannya masih dilaksanakan pada masa pandemi, pemerintah dapat mempertimbangkan dan menerapkan kebijakan wajib swab gratis. Ihwal ini disebabkan karena ada sebagian peserta memiliki permasalahan secara finansial, sehingga memberatkan sebagian peserta. Harapan selanjutnya, pemerintah dapat memberikan edukasi secara mendalam melalui sosialisasi mengenai swab PCR atau antigen karena ada mindset sebagian peserta menganggap setelah pelaksanaan swab hasilnya pasti akan positif, sehingga berdampak pada kegiatan isolasi mandiri. Padahal konsep swab apabila kondisi tubuh dalam keadaan normal, maka hasilnya tidak akan positif. Kegiatan penelitian seperti ini menjadi masukan bagi pemerintah sebagai pertimbangan rekomendasi pengambilan kebijakan.

REFERENSI

- AG, S. (2015). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi* (Cetakan VI). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, M. (n.d.). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Andrasromo, D., & Nurekawati, E. E. (2016). Analisis Kesiapan Mahasiswa Dalam Melaksanakan Program Pengalaman Lapangan Di Prodi Pendidikan Geografi Tahun 2015. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 3(1), 29–40.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Basrowi, S. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Daniarsyah, D., & Rusdi, R. (2021). Model Pengadaan CPNS Masa Bencana Nasional Non Alam. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(1), 176–189.
- Dwiningrum, S. I. A. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan* (Cetakan I). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Erlangga, D. (2019). Pelamar CPNS Meningkatkan dari Tahun Ke Tahun. Retrieved from inipasti.com website: <https://inipasti.com/pelamar-cpns-meningkat-dari-tahun-ke-tahun/>
- Indonesia, P. N. R. (2014). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*.
- Kalesaran, F. (2015). Partisipasi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kelurahan Taas Kota Manado. *Jurnal Ilmiah Society*, 1(15), 56–73.

- KBBI Daring. (2016). KBBI Daring Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Retrieved June 3, 2022, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kehadiran>
- Lenaini, I. (2021). TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL PURPOSIVE DAN SNOWBALL SAMPLING. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39.
- Lintjewas, O., Tulus, F., & Egetan, M. (2016). Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Ilmiah Society*, 2(20).
- Maheza. (2021). Formasi CPNS dan PPPK 2021 Aceh Barat, Berikut Syaratnya. Retrieved October 15, 2021, from analisaaceh.com website: <https://analisaaceh.com/formasi-cpns-dan-pppk-2021-aceh-barat/>
- Mela Arnani. (2021). Peserta SKD CPNS 2021 Wajib Swab PCR atau Antigen, Berikut Aturannya. Retrieved from Kompas.com website: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/24/140000565/peserta-skd-cpns-2021-wajib-swab-pcr-atau-antigen-berikut-aturannya?page=all>
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Choirul, A. (2021). Pelamar CPNS dan PPPK 2021 Capai 3 Juta, Pendaftaran Ditutup 21 Juli. Retrieved from Kompas.com website: <https://money.kompas.com/read/2021/07/18/171631626/pelamar-cpns-dan-pppk-2021-capai-3-juta-pendaftaran-ditutup-21-juli?page=all>
- Nurdiani, N. (2014). Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan. *COMTECH: COMPUTER, MATHEMATICS AND ENGINEERING APPLICATIONS*, 5 No 2. Retrieved from <https://journal.binus.ac.id/index.php/comtech/article/view/2427>
- Rahardjo, M. (2013). Etika Penelitian. Retrieved from Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang website: <https://www.uin-malang.ac.id/t/131101/etika-penelitian.html>
- Tahir, A. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Pertama; H. Hadjrati, Ed.). Jakarta: PT Grafika Utama Jakarta.
- Tohir, A. R. (2010). *LKP: Sistem Informasi Kehadiran Kerja dan Penggajian pada PT. Utama Karya (Persero)*. Stikom Surabaya.
- Wulandari, F. (2014). IMPLEMENTASI METODE COMPUTER ASSISTED TEST (CAT) DALAM REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA. *Publika*, 2(3).
- Yulianto, K. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas* (Cetakan Pe). Gorontalo: UNG Press Gorontalo.